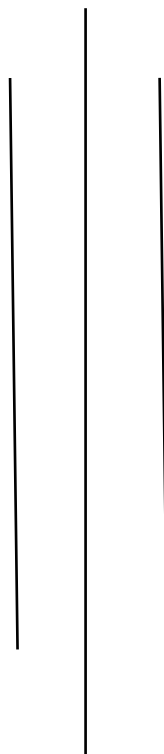




PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
LAPORAN KEUANGAN
TA.2023



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI UTARA



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
SURAT PERNYATAAN.....	2
DAFTAR ISI.....	
BAB. I. PENDAHULUAN.....	3
1.1. Maksud dan Tujuan.	
A.Akuntabilitas	
B.Manajemen.	
C.Transparansi.	
Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.	
1.1.1. Lapoaran Realisasi Anggaran.	
1.1.2. Neraca.	
1.1.3. Catatan atas Laporan Keuangan.	
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.	
1.3. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara.	
1.4. Sumber Daya Manusia.	
1.5. Sistimatika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.	
BAB. II. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	7
2.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan.	
2.2. Kebijakan Akuntansi.	
2.2.1. Kas dibendahara Pengeluaran.	
2.2.2. Asset Tetap.	
2.2.3. Asset Tetap Lainnya.	
2.2.4. Asset Lain-lain.	
2.2.5. Kewajiban.	
2.2.6. Sisa Lebih Kurang.	
2.2.7. Pendapatan.	
2.2.8. Belanja.	
BAB. III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	10
3.1. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.	
3.2. Penyelesaian atas Laporan Realisasi Anggaran.	
3.3. Laporan Operasional.	
3.4. Laporan Perubahan Ekuitas.	
BAB. IV. PENUTUP.....	14
LAMPIRAN LAPORAN BARANG TAHUN ANGGARAN 202	



Kata Pengantar

Segala Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya semata, sehingga penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi. Laporan Keuangan Ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara.

Demikian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini kami sajikan, Semoga Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Tarutung, 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

RUDI SITORUS, S.Sos.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA /IV-c
NIP : 19720429 199203 1 003.-



**Laporan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2023.**

SURAT PERNYATAAN

Nomor : /16.1.2/ /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudi Sitorus, S.Sos.M.Si
NIP : 19720429 199203 1 003
Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IV-c
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara

Dengan ini menyatakan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara telah dilaksanakan dan diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal serta transparan.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat sesungguhnya dengan penuh rasa tanggungjawab dan untuk dipergunakan seperlunya.

Tarutung, 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

RUDI SITORUS,S.Sos.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA /IV-c
NIP : 19720429 199203 1 003.-



BAB I PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, Realisasi Anggaran, kinerja Keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan Anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi Satuan Polisi Pamong Praja dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan Perundang-undangan.

Pelaporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna Laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Secara umum, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk :

A. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan yang lebih ditetapkan secara periodik.

B. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana Satuan Polisi Pamong Praja untuk kepentingan Masyarakat.

C. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari :

1.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi



tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

1.1.2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

1.1.3 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dalam pencapaian target;
- b. ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk ditetapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

1.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4548);
- c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



**Laporan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2023.**

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah;.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;.
- l. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;.
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;.
- n. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;.

1.3. GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2004 tentang Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berada di Jalan Sisingamangaraja Nomor 197 Tarutung.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk sebagai realisasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara saat ini dipimpin oleh :

Kepala Satuan : RUDI SITORUS, S.Sos.M.Si.

NIP. : 197204291992031003



Pangkat/Gol.Ruang : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara adalah ” Mewujudkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.”

Visi memberikan arah dan tujuan yang akan diwujudkan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan, serta untuk menumbuhkan Sense of Participation and Sense of Belonging di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang kondusif.
2. Meningkatkan kesiapsiagaan Aparat Petugas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam di Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Penegakan Peraturan Daerah dan Penertiban Perizinan.
4. Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut;

A. Menurut Jabatan dan Fungsi

• Pejabat Struktural Eselon II	=	1	Orang
• Pejabat Struktural Eselon III	=	4	Orang
• Pejabat Struktural Eselon IV	=	8	Orang
• Staf	=	23	Orang
• Tenaga Kontrak	=	237	Orang
Jumlah Total	=	273	Orang

B. Menurut Strata Pendidikan

• SLTA	=	227	Orang
• D III	=	8	Orang
• S-1	=	36	Orang
• S-2	=	2	Orang
Jumlah Total	=	273	Orang

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara
- 1.4. Sumber Daya Manusia
- 1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan



Bab II : Kebijakan Akuntansi

Bab III : Penjelasan Pos- pos Laporan Keuangan

Bab IV : Penutup.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.1 DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

- A.Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor .24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- B.Jangka waktu Pembukuan adalah 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember;
- C.Mata uang yang digunakan adalah Rupiah, bila terdapat valuta asing disetarakan dengan Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca;
- D.Laporan Keuangan dari Satuan Polisi Pamong Praja disajikan berdasarkan konsep biaya historis atau biaya perolehan,kecuali untuk asset tetap/ inventaris/ kekayaan yang tidak ditemukan dokumen harga perolehannya dinilai berdasarkan nilai wajar;
- E.Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara adalah :
 - 1. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja ;
 - 2. Basis Akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas.

2.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.2.1. KAS DIBENDAHARA PENGELUARAN

- A.Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang tunai dan saldo rekening bank yang masih berada pada penguasaan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang berasal dari sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca.
- B.Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2.2.2. ASSET TETAP

- A.Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan;
- B.Asset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan (*Historical Cost*) termasuk didalamnya biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh asset tetap;
- C.Asset tetap dalam pengerjaan dinilai dalam neraca sebesar realisasi biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh asset tersebut;
- D.Nilai asset tetap bertambah apabila terjadi penambahan dan berkurang nilainya apabila terjadi penghapusan.



Kebijakan akuntansi untuk tanah diatur sebagai berikut :

1. Tanah
Nilai Tanah dinilai berdasarkan harga perolehan
2. Peralatan dan mesin
Peralatan dan mesin dinilai berdasarkan harga perolehan;
3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan dinilai berdasarkan harga perolehan;
4. Akumulasi penyusutan
Akumulasi penyusutan mengacu pada akumulasi pengurangan nilai suatu aset dari waktu ke waktu
5. Asset Tetap Lainnya
 - a. Asset tetap lainnya adalah berupa buku perpustakaan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. Buku Perpustakaan dicatat dalam neraca sebesar nilai wajar.

2.2.3. ASSET TETAP LAINNYA

Asset lainnya adalah berupa asset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset tetap dan asset tersebut tidak dimanfaatkan.

2.2.4. ASSET LAIN-LAIN

Asset lain-lain adalah berupa asset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset tetap dan asset tersebut tidak dimanfaatkan.

2.2.5. KEWAJIBAN

- A. Kewajiban jangka pendek adalah utang yang harus dibayar kepada pihak ketiga yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.
- B. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kepada pihak ketiga yang akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
- C. Kewajiban diakui pada saat kewajiban tersebut timbul.
- D. Kewajiban dibukukan di neraca sebesar nilai nominal dari kewajiban tersebut.
- E. Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan kedalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal neraca.

2.2.6 SISA LEBIH KURANG

Sisa lebih/kurang adalah akumulasi surplus/defisit dengan pembiayaan netto.

2.2.7 PENDAPATAN

Basis akuntansi untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah basis kas.



**Laporan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2023.**

- A. Pendapatan adalah semua penerimaan daerah yang menjadi target penerimaan asli daerah yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja yang telah disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan menambah ekuitas dana lancar dalam periode Laporan Keuangan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
- B. Pendapatan diakui pada saat uang diterima di rekening Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- C. Pembukuan pendapatan dilaksanakan dengan menggunakan azas bruto yakni membukukan penerimaan bruto atas pendapatan.
- D. Koreksi penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang.
- E. Sedangkan penerimaan pendapatan dari periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurangan dana lancar.

2.2.8. BELANJA

- A. Belanja adalah semua pengeluaran yang anggarannya dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dananya diperoleh dari Kas Umum Daerah Kabupaten Utara yang mengurangi ekuitas dana Lancar dalam periode Laporan Keuangan serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- B. Belanja diakui pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Anggaran.
- C. Belanja dalam Laporan Keuangan diklasifikasikan ke dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal.
- D. Koreksi atas pengeluaran (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dibukukan sebagai pengurangan pengeluaran, sedangkan atas pengeluaran dari periode sebelumnya, dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar.



BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

- 1) Aset Lancar
- Nilai Aset Lancar Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 449.000** terdiri atas Persediaan Barang.
- Persediaan Barang **Rp. 449.000**
- Jumlah Saldo Persediaan Barang Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 449.000**
- 2) Aset Tetap **Rp. 4.237.293.205,86**
- Nilai Aset tetap Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 4.237.293.205,86** terdiri atas :
- a. Tanah **Rp. 30.375.000**
- Nilai tanah per 31 Desember 2023 yang tercatat dalam daftar inventaris Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di Jalan Pintu Air Kecamatan Siborong-borong dengan luas 135 m² dicatat di Sekdakab Tapanuli Utara, yang dipergunakan untuk operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Tapanuli Utara serta untuk **Rp. 30.375.000**.
- b. Peralatan dan Mesin **Rp. 11.401.472.179**
- Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dengan data terlampir.
- c. Gedung Kantor **Rp. 2.445.448.294**
- Jumlah tersebut merupakan nilai bangunan gedung kantor per 31 Desember 2023 yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Nomor 197, Pos Damkar Terminal Kecamatan Tarutung, Pos Damkar di Jalan Pintu Air Kecamatan Siborong-borong serta Pos Damkar terletak di Sarulla Kecamatan Pahae Jae dengan luas tanah dan Bangunan serta rehab pos Damkar kecamatan Siborong-borong dan pos Damkar Kecamatan Pangaribuan berjumlah total 2.311 m² dan dipergunakan untuk operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Tapanuli Utara (Daftar terlampir)
- d. Akumulasi Penyusutan **Rp. (9.697.670.087,72)**
- 3) Aset Lainnya **Rp. 727.754.997**
- Asset aset lainnya **Rp. 727.754.997**
- 4) Ekuitas **Rp. 4.965.497.201,40**



Ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2023 yaitu berupa cadangan untuk persediaan dengan rincian sebagai berikut :

Surplus/Defisit-Lo	Rp. (11.377.442.011,83)
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	Rp. 10.826.716.782

3.2. Penjelasan Atas Laporan Realisasi Anggaran

1) Pendapatan Rp. Nihil

Satuan Polisi Pamong Praja tidak ditargetkan dalam penerimaan Pendapatan, sehingga PAD adalah NIHIL.

2) Belanja Rp. 10.826.716.782

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 10.826.716.782 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 10.772.016.782 dan Belanja Modal sebesar Rp. 54.700.000 serta dengan rincian sebagai berikut : (Rupiah)

BELANJA	ANGGARAN	REALISASI
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	Rp. 2.649.914.274	Rp. 2.611.742.585
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.186.703.578	Rp. 8.160.274.197
Jumlah Belanja Operasi	Rp. 10.836.617.852	Rp. 10.772.016.782
BELANJA MODAL		
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 55.136.700	Rp. 54.700.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Belanja Modal	Rp. 55.136.700	Rp. 54.700.000
Jumlah Belanja	Rp. 10.891.754.552	Rp. 10.826.716.782

a) Belanja Operasi Rp. 10.772.016.782

Realisasi belanja operasi adalah merupakan seluruh pengeluaran untuk belanja Pegawai sebesar Rp. 2.611.742.585 dan belanja barang sebesar Rp. 8.160.274.197 total Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 10.772.016.782 sedangkan Anggaran Belanja Operasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 10.836.617.852 maka terdapat kelebihan Anggaran sebesar 64.601.070

b) Belanja Modal Rp. 54.700.000

Belanja modal tersebut adalah belanja peralatan dan mesin sebesar Rp. 54.700.000 serta belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 0 dan



3) SILPA	Rp.	(65.037.770,00)
Berdasarkan surplus/defisit anggaran dan pembiayaan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp.(65.037.770,00)		

3.3 Penjelasan Perubahan Anggaran

Setelah terbit Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 19 Desember 2022 maka diterbitkan Kembali Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Sebesar **Rp.1.327.173.639** diakomodir untuk penambahan Anggaran pada pos :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah sebesar **Rp. 202.338.389** yang sebelum adanya penambahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar **Rp. 2.451.365.885** sehingga setelah ditambah menjadi **Rp. 2.653.704.274**
2. Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah sebesar : **Rp. 60.025.000** yang sebelum adanya penambahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar **Rp. 211.279.100** sehingga setelah ditambah menjadi **Rp. 271.304.100**
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan perangkat Daerah sebesar : **Rp. 315.799.600** yang sebelum adanya penambahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar **Rp. 4.232.895.728** sehingga setelah ditambah menjadi **Rp. 4.548.695.328**
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar : **Rp. 124.221.750** yang sebelum adanya penambahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar **Rp. 306.170.050** sehingga setelah ditambah menjadi **Rp. 430.391.800**
5. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar : **Rp. 723.993.700** yang sebelum adanya penambahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar **Rp. 1.265.281.350** sehingga setelah ditambah menjadi **Rp. 1.989.275.050**
6. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebesar: **Rp. 148.250.900** yang sebelum adanya penambahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar **Rp. 353.146.800** sehingga setelah ditambah menjadi **Rp. 501.397.700**



7. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar: **Rp. 199.949.900** yang sebelum adanya pertambahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar **Rp. 168.300.000** sehingga setelah ditambah menjadi **Rp. 368.249.900**

PEMBIAYAAN	JUMLAH
PENDAPATAN	Rp. 10.891.754.552
BELANJA	Rp. 10.826.716.782
DEFISIT	Rp. (10.826.716.782)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp. (65.037.770)

3.3 Laporan Operasional

1. Beban Pegawai-LO

Rp. 2.611.742.585

Beban pegawai di Laporan Operasional sebesar **Rp. 2.611.742.585** jumlah ini sama dengan jumlah Pegawai di Laporan Realisasi Anggaran.
2. Beban Barang Jasa

Rp. 8.160.336.197

Beban Barang Jasa di Laporan Operasional sebesar **Rp. 8.160.336.197** jumlah ini berbeda dengan Belanja Barang dan Jasa Laporan Realisasi Anggaran sebesar **8.160.274.197,00**, sehingga terdapat selisih sebesar Rp,62.000
- I. Persediaan tahun 2022

= Rp. 511.000
- II. Persediaan tahun 2023

= Rp 449.000
3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

= Rp. 605.363.229,83

Beban penyusutan dan Amortisasi sebesar **Rp. 599.985.325,88** merupakan penyusutan Aset Tahun 2023
4. Surplus/ Defisit

Rp. (11.377.442.011,83)

Surplus/ Defisit –LO sebesar **Rp. (11.377.442.011,83)** merupakan perhitungan dari jumlah beban Operasi Rp. 10.772.078.782 ditambah jumlah beban penyusutan dan Amosrtisasi Rp. **605.363.229,83.**

3.4 Laporan Perubahan Ekuitas

- a. Ekuitas Awal

Rp. 5.117.156.944

Ekuitas Awal di Laporan Perubahan Ekuitas sebesar **Rp. 5.117.156.944** jumlah tersebut merupakan saldo awal 2023 dilaporan neraca.
- b. Surplus/ Defisit –LO

Rp. (11.377.442.011,83)



**Laporan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2023.**

Surplus/ Defisit –LO di Laporan Perubahan Ekuitas sebesar **Rp. (10.772.078.782)** jumlah tersebut merupakan surplus/ defisit di Laporan Operasional.

- c. Koreksi Ekuitas **Rp. 399.065.486,76**
Koreksi Ekuitas lainnya di Laporan Operasional sebesar 399.065.486,76 merupakan hasil koreksi ekuitas dari :
- 1. Koreksi nilai persediaan = 0,00
 - 2. Koreksi selisih revaluasi asset tetap = 0,00
 - 3. Lain-lain = 399.065.486,76
- d. Ekuitas Akhir **Rp. 4.965.497.201,40**
Ekuitas Akhir sebesar **Rp. 4.965.497.201,40** merupakan selisih ekuitas awal surplus/ defisit – Lo dan koreksi ekuitas lainnya.



BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai ketaatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta sebagai bentuk Transparansi dan Akuntabilitas kepada masyarakat.

Materi Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 ini pada dasarnya memuat laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan serta lampiran yang terkait dengan Pos-Pos Neraca.

Penyusunan laporan Keuangan ini telah memperhatikan Standart Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, terutama dalam klasifikasi Pos-Pos Neraca, Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tarutung, 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**RUDI SITORUS, S.Sos. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA /IV-c
NIP : 19720429 199203 1 003.-**



**Laporan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2023.**



PEMERINTAH KAB. TAPANULI UTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	5.117.156.944,47	3.315.850.836,76
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(11.377.442.011,83)	(11.951.641.170,73)
RK PPKD	10.826.716.782,00	13.023.871.287,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	(11.339.509.560,00)
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	399.065.486,76	12.068.585.551,44
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(57.238.230,00)	0,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(7.304.000,00)	0,00
Alat Kantor Lainnya	(8.400.000,00)	0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.400.000,00	0,00
Alat Pemadam Kebakaran	141.336.300,00	0,00
Alat Keamanan	(10.200.000,00)	0,00
Non Senjata Api	10.200.000,00	0,00
Personal Computer	27.173.750,00	0,00
Komputer Unit Lainnya	(19.500.000,00)	0,00
Peralatan Personal Computer	(26.800.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	257.729.186,76	0,00
Aset Rusak Berat/Usang	83.668.480,00	0,00
EKUITAS AKHIR	4.965.497.201,40	5.117.156.944,47

Kab. Tapanuli Utara, 18 April 2024
Kepala SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RUDI SITORUS, S.SOS, M.Si
NIP. 197204291992031003



PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	11.377.442.011,83	11.951.641.170,73	(574.199.158,90)	(4,80)
8.1	BEBAN OPERASI	10.772.078.782,00	10.878.747.524,00	(106.668.742,00)	(0,98)
8.1.01	Beban Pegawai	2.611.742.585,00	2.446.896.403,00	164.846.182,00	6,74
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.926.823.385,00	1.793.182.203,00	133.641.182,00	7,45
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1.420.688.240,00	1.313.260.840,00	107.427.400,00	8,18
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.388.283.240,00	1.313.260.840,00	75.022.400,00	5,71
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	32.405.000,00	0,00	32.405.000,00	100,00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	139.573.810,00	138.426.672,00	1.147.138,00	0,83
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	137.985.490,00	138.426.672,00	(441.182,00)	(0,32)
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	1.588.320,00	0,00	1.588.320,00	100,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	133.740.000,00	113.070.000,00	20.670.000,00	18,28
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	133.740.000,00	113.070.000,00	20.670.000,00	18,28
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	0,00	12.360.000,00	(12.360.000,00)	(100,00)
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	0,00	12.360.000,00	(12.360.000,00)	(100,00)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	49.435.000,00	40.945.000,00	8.490.000,00	20,74
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	47.265.000,00	40.945.000,00	6.320.000,00	15,44
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	100,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	86.759.160,00	86.179.800,00	579.360,00	0,67
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	85.455.600,00	86.179.800,00	(724.200,00)	(0,84)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	1.303.560,00	0,00	1.303.560,00	100,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.336.596,00	3.126.083,00	210.513,00	6,73
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.336.596,00	3.126.083,00	210.513,00	6,73
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	18.089,00	17.877,00	212,00	1,15
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	17.157,00	17.877,00	(720,00)	(4,03)
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	932,00	0,00	932,00	100,00
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	81.478.191,00	75.023.199,00	6.454.992,00	8,60
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	80.031.657,00	75.023.199,00	5.008.458,00	6,68
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.446.534,00	0,00	1.446.534,00	100,00
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.948.588,00	2.693.170,00	255.418,00	9,48
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.870.818,00	2.693.170,00	177.648,00	6,60
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	77.770,00	0,00	77.770,00	100,00
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.845.711,00	8.079.562,00	766.149,00	9,48
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8.612.393,00	8.079.562,00	532.831,00	6,59
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	233.318,00	0,00	233.318,00	100,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	634.150.000,00	592.735.000,00	41.415.000,00	6,99
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	634.150.000,00	592.735.000,00	41.415.000,00	6,99
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	634.150.000,00	592.735.000,00	41.415.000,00	6,99
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.769.200,00	60.979.200,00	(10.210.000,00)	(16,74)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	50.769.200,00	60.979.200,00	(10.210.000,00)	(16,74)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	50.239.200,00	50.239.200,00	0,00	0,00
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	530.000,00	10.740.000,00	(10.210.000,00)	(95,07)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	8.160.336.197,00	8.431.851.121,00	(271.514.924,00)	(3,22)
8.1.02.01	Beban Barang	1.624.484.925,00	1.569.167.073,00	55.317.852,00	3,53
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	1.624.484.925,00	1.569.167.073,00	55.317.852,00	3,53
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	7.999.600,00	(7.999.600,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	395.263.950,00	485.154.150,00	(89.890.200,00)	(18,53)
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	31.017.600,00	0,00	31.017.600,00	100,00
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	153.468.000,00	38.548.711,00	114.919.289,00	298,11
8.1.02.01.01.0014	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	3.521.000,00	(3.521.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	136.146.032,00	(136.146.032,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.640.800,00	25.816.200,00	(175.400,00)	(0,68)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.261.675,00	35.724.700,00	(5.463.025,00)	(15,29)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.380.000,00	1.330.000,00	50.000,00	3,76
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.999.600,00	0,00	7.999.600,00	100,00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	141.336.300,00	77.331.480,00	64.004.820,00	82,77
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.170.500,00	7.070.800,00	(900.300,00)	(12,73)
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	811.826.500,00	681.422.400,00	130.404.100,00	19,14
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	320.000,00	69.102.000,00	(68.782.000,00)	(99,54)
8.1.02.01.01.0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	100,00
8.1.02.02	Beban Jasa	6.228.550.174,00	6.615.501.450,00	(386.951.276,00)	(5,85)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	6.171.983.346,00	6.570.275.858,00	(398.292.512,00)	(6,06)
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.325.000,00	0,00	9.325.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	11.082.000,00	(11.082.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.923.149.600,00	2.484.332.134,00	(561.182.534,00)	(22,59)
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.203.000.000,00	4.044.000.000,00	159.000.000,00	3,93
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	0,00	18.400.000,00	(18.400.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	11.115.000,00	0,00	11.115.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	2.220.925,00	2.083.000,00	137.925,00	6,62
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	10.532.707,00	4.694.114,00	5.838.593,00	124,38

8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.510.104,00	0,00	6.510.104,00	100,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.130.010,00	5.684.610,00	445.400,00	7,84
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	46.566.828,00	45.225.592,00	1.341.236,00	2,97
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.695.752,00	20.100.271,00	595.481,00	2,96
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	25.871.076,00	25.125.321,00	745.755,00	2,97
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
8.1.02.02.05.0030	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	43.269.200,00	63.343.523,00	(20.074.323,00)	(31,69)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.269.200,00	63.343.523,00	(20.074.323,00)	(31,69)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.896.400,00	0,00	35.896.400,00	100,00
8.1.02.03.02.0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	26.200.000,00	(26.200.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0043	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	29.983.523,00	(29.983.523,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.372.800,00	7.160.000,00	212.800,00	2,97
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	247.531.898,00	183.839.075,00	63.692.823,00	34,65
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	247.531.898,00	183.839.075,00	63.692.823,00	34,65
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	180.171.898,00	130.539.075,00	49.632.823,00	38,02
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	67.360.000,00	53.300.000,00	14.060.000,00	26,38
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	10.772.078.782,00	10.878.747.524,00	(106.668.742,00)	(0,98)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	605.363.229,83	1.072.893.646,73	(467.530.416,90)	(43,58)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	556.929.677,00	1.030.764.246,58	(473.834.569,58)	(45,97)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	556.929.677,00	1.030.764.246,58	(473.834.569,58)	(45,97)
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	556.929.677,00	1.030.764.246,58	(473.834.569,58)	(45,97)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	48.433.552,83	42.129.400,15	6.304.152,68	14,96
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	48.433.552,83	42.129.400,15	6.304.152,68	14,96
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	48.433.552,83	42.129.400,15	6.304.152,68	14,96
	JUMLAH BEBAN Penyusutan dan Amortisasi	605.363.229,83	1.072.893.646,73	(467.530.416,90)	(43,58)
	JUMLAH BEBAN	11.377.442.011,83	11.951.641.170,73	(574.199.158,90)	(4,80)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(11.377.442.011,83)	(11.951.641.170,73)	574.199.158,90	(4,80)

Kab. Tapanuli Utara, 18 April 2024
Kepala SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



RUDI SITORUS, S.SOS, M.Si
NIP.197204291992031003



PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

ode Rekenir	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	10.891.754.552	10.826.716.782,00	99,40	13.434.005.005,58
5.1	BELANJA OPERASI	10.836.617.852	10.772.016.782,00	99,40	10.878.875.724,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.649.914.274	2.611.742.585,00	98,56	2.446.896.403,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.961.263.124	1.926.823.385,00	98,24	1.793.182.203,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.441.210.010	1.420.688.240,00	98,58	1.313.260.840,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS	1.400.910.010	1.388.283.240,00	99,10	1.313.260.840,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok PPPK	40.300.000	32.405.000,00	80,41	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	145.208.850	139.573.810,00	96,12	138.426.672,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	139.358.850	137.985.490,00	99,01	138.426.672,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.850.000	1.588.320,00	27,15	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	136.174.525	133.740.000,00	98,21	113.070.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	136.174.525	133.740.000,00	98,21	113.070.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0	0,00	0,00	12.360.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0	0,00	0,00	12.360.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	49.882.150	49.435.000,00	99,10	40.945.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	47.412.150	47.265.000,00	99,69	40.945.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.470.000	2.170.000,00	87,85	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	89.943.644	86.759.160,00	96,46	86.179.800,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras PNS	86.173.644	85.455.600,00	99,17	86.179.800,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.770.000	1.303.560,00	34,58	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.366.465	3.336.596,00	99,11	3.126.083,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.366.465	3.336.596,00	99,11	3.126.083,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	43.210	18.089,00	41,86	17.877,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.210	17.157,00	99,69	17.877,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	26.000	932,00	3,58	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	83.433.340	81.478.191,00	97,66	75.023.199,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	81.483.340	80.031.657,00	98,22	75.023.199,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.950.000	1.446.534,00	74,18	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.998.623	2.948.588,00	98,33	2.693.170,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.901.123	2.870.818,00	98,96	2.693.170,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	97.500	77.770,00	79,76	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.002.307	8.845.711,00	98,26	8.079.562,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.703.307	8.612.393,00	98,96	8.079.562,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	299.000	233.318,00	78,03	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	637.201.950	634.150.000,00	99,52	592.735.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	637.201.950	634.150.000,00	99,52	592.735.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	637.201.950	634.150.000,00	99,52	592.735.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	51.449.200	50.769.200,00	98,68	60.979.200,00
5.1.01.03.01	Belanja Honorarium	51.449.200	50.769.200,00	98,68	60.979.200,00
5.1.01.03.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	50.239.200	50.239.200,00	100,00	50.239.200,00
5.1.01.03.01	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.210.000	530.000,00	43,80	10.740.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.186.703.578	8.160.274.197,00	99,68	8.431.979.321,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.629.202.450	1.624.422.925,00	99,71	1.569.295.273,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.629.202.450	1.624.422.925,00	99,71	1.569.295.273,00
5.1.02.01.01	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0,00	0,00	7.999.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	395.263.950	395.263.950,00	100,00	485.154.150,00
5.1.02.01.01	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	31.017.600	31.017.600,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	153.479.200	153.468.000,00	99,99	38.548.711,00
5.1.02.01.01	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0	0,00	0,00	3.521.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0	0,00	0,00	136.146.032,00
5.1.02.01.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.985.600	25.578.800,00	85,30	25.944.400,00
5.1.02.01.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.276.900	30.261.675,00	99,95	35.724.700,00
5.1.02.01.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.380.000	1.380.000,00	100,00	1.330.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.999.600	7.999.600,00	100,00	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	141.591.800	141.336.300,00	99,82	77.331.480,00
5.1.02.01.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.171.300	6.170.500,00	99,99	7.070.800,00
5.1.02.01.02	Belanja Natura dan Pakan-Natura	811.916.500	811.826.500,00	99,99	681.422.400,00
5.1.02.01.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	320.000	320.000,00	100,00	69.102.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	19.800.000	19.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.248.613.328	6.228.550.174,00	99,68	6.615.501.450,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.192.046.500	6.171.983.346,00	99,68	6.570.275.858,00
5.1.02.02.01	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.650.000	9.325.000,00	96,63	0,00
5.1.02.02.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0,00	0,00	11.082.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.923.232.200	1.923.149.600,00	100,00	2.484.332.134,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.203.000.000	4.203.000.000,00	100,00	4.044.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	0,00	0,00	18.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	11.115.000	11.115.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Tagihan Air	3.599.100	2.220.925,00	61,71	2.083.000,00

5.1.02.02.0	Belanja Tagihan Listrik	12.399.400	10.532.707,00	84,95	4.694.114,00
5.1.02.02.0	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.000.000	6.510.104,00	36,17	0,00
5.1.02.02.0	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.050.800	6.130.010,00	55,47	5.684.610,00
5.1.02.02.0	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	46.566.828	46.566.828,00	100,00	45.225.592,00
5.1.02.02.0	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.695.752	20.695.752,00	100,00	20.100.271,00
5.1.02.02.0	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	25.871.076	25.871.076,00	100,00	25.125.321,00
5.1.02.02.0	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.0	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.600.000	1.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.0	Belanja Sewa Hotel	8.400.000	8.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	43.372.800	43.269.200,00	99,76	63.343.523,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.372.800	43.269.200,00	99,76	63.343.523,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	36.000.000	35.896.400,00	99,71	0,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0	0,00	0,00	26.200.000,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0	0,00	0,00	29.983.523,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.372.800	7.372.800,00	100,00	7.160.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	249.015.000	247.531.898,00	99,40	183.839.075,00
5.1.02.04.0	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	249.015.000	247.531.898,00	99,40	183.839.075,00
5.1.02.04.0	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	181.615.000	180.171.898,00	99,21	130.539.075,00
5.1.02.04.0	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	67.400.000	67.360.000,00	99,94	53.300.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.500.000	16.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.0	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.500.000	16.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.0	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	16.500.000	16.500.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	10.836.617.852	10.772.016.782,00	99,40	10.878.875.724,00
5.2	BELANJA MODAL	55.136.700	54.700.000,00	99,21	2.555.129.281,58
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.136.700	54.700.000,00	99,21	2.355.272.755,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0	0,00	0,00	2.340.975.015,00
5.2.02.02.0	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0,00	0,00	2.340.975.015,00
5.2.02.02.0	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0	0,00	0,00	2.340.975.015,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.400.000	8.400.000,00	100,00	6.697.740,00
5.2.02.05.0	Belanja Modal Alat Kantor	8.400.000	8.400.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.0	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.400.000	8.400.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.0	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	0,00	6.697.740,00
5.2.02.05.0	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0	0,00	0,00	6.697.740,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	46.736.700	46.300.000,00	99,07	7.600.000,00
5.2.02.10.0	Belanja Modal Komputer Unit	19.736.700	19.500.000,00	98,80	7.600.000,00
5.2.02.10.0	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	19.736.700	19.500.000,00	98,80	7.600.000,00
5.2.02.10.0	Belanja Modal Peralatan Komputer	27.000.000	26.800.000,00	99,26	0,00
5.2.02.10.0	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	27.000.000	26.800.000,00	99,26	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	199.856.526,58
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0,00	0,00	199.856.526,58
5.2.03.01.0	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0,00	0,00	199.856.526,58
5.2.03.01.0	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	0,00	0,00	199.856.526,58
	JUMLAH BELANJA MODAL	55.136.700	54.700.000,00	99,21	2.555.129.281,58
	JUMLAH BELANJA	10.891.754.552	10.826.716.782,00	99,40	13.434.005.005,58
	SURPLUS/DEFISIT	(10.891.754.552)	(10.826.716.782,00)	99,40	(13.434.005.005,58)

Kab. Tapanuli Utara, 18 April 2024
Kepala SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



RUDI SITORUS, S.SOS, M.Si
NIP. 197204291992031003



PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	4.965.497.202,86	5.117.156.945,93
1.1	ASET LANCAR	449.000,00	511.000,00
1.1.12	Persediaan	449.000,00	511.000,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	449.000,00	511.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	449.000,00	511.000,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	449.000,00	511.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	449.000,00	511.000,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	4.237.293.205,86	4.472.559.428,93
1.3.01	Tanah	30.375.000,00	30.375.000,00
1.3.01.01	Tanah	30.375.000,00	30.375.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	30.375.000,00	30.375.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	30.375.000,00	30.375.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	11.459.139.999,00	11.346.772.179,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	9.573.802.724,00	9.631.040.954,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	9.573.802.724,00	9.631.040.954,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	358.000.000,00	358.000.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	179.801.582,00	179.801.582,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	257.572.038,00	314.810.268,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	8.778.429.104,00	8.778.429.104,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.438.819.738,00	1.296.387.438,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	23.652.000,00	30.956.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.652.000,00	10.956.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.348.882.948,00	1.199.146.648,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	79.477.500,00	79.477.500,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.532.000,00	11.132.000,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	1.249.873.448,00	1.108.537.148,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	66.284.790,00	66.284.790,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	64.400.000,00	64.400.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	1.884.790,00	1.884.790,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	7.600.000,00	7.600.000,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	7.600.000,00	7.600.000,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	7.600.000,00	7.600.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	322.406.123,00	322.406.123,00
1.3.02.09.01	Senjata Api	96.600.000,00	96.600.000,00
1.3.02.09.01.0001	Senjata Genggam	96.600.000,00	96.600.000,00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	225.806.123,00	225.806.123,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	215.606.123,00	225.806.123,00
1.3.02.09.02.0002	Non Senjata Api	10.200.000,00	0,00
1.3.02.10	Komputer	115.511.414,00	88.337.664,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	95.371.414,00	68.197.664,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	95.371.414,00	68.197.664,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	20.140.000,00	20.140.000,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	640.000,00	640.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	19.500.000,00	19.500.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.445.448.294,58	2.445.448.294,58
1.3.03.01	Bangunan Gedung	2.445.448.294,58	2.445.448.294,58
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.445.448.294,58	2.445.448.294,58
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	1.330.990.772,60	1.330.990.772,60
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	421.152.000,00	421.152.000,00
1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	99.800.000,00	99.800.000,00

1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	593.505.521,98	593.505.521,98
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(9.697.670.087,72)	(9.350.036.044,65)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.160.495.641,28)	(8.861.295.151,04)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(9.160.495.641,28)	(8.861.295.151,04)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(9.160.495.641,28)	(8.861.295.151,04)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(537.174.446,44)	(488.740.893,61)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(537.174.446,44)	(488.740.893,61)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(537.174.446,44)	(488.740.893,61)
	JUMLAH ASET TETAP	4.237.293.205,86	4.472.559.428,93
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	727.754.997,00	644.086.517,00
1.5.04	Aset Lain-lain	727.754.997,00	644.086.517,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	727.754.997,00	644.086.517,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	727.754.997,00	644.086.517,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	727.754.997,00	644.086.517,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	727.754.997,00	644.086.517,00
	JUMLAH ASET	4.965.497.202,86	5.117.156.945,93
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	4.965.497.201,40	5.117.156.944,47
3.1	EKUITAS	4.965.497.201,40	5.117.156.944,47
3.1.01	Ekuitas	(5.861.219.580,60)	(7.906.714.342,53)
3.1.01.01	Ekuitas	5.516.222.431,23	4.044.926.828,20
3.1.01.01.01	Ekuitas	5.516.222.431,23	4.044.926.828,20
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	5.516.222.431,23	4.044.926.828,20
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(11.377.442.011,83)	(11.951.641.170,73)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(11.377.442.011,83)	(11.951.641.170,73)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(11.377.442.011,83)	(11.951.641.170,73)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	10.826.716.782,00	13.023.871.287,00
3.1.03.01	RK PPKD	10.826.716.782,00	13.023.871.287,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	10.826.716.782,00	13.023.871.287,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	10.826.716.782,00	13.023.871.287,00
	JUMLAH EKUITAS	4.965.497.201,40	5.117.156.944,47
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.965.497.201,40	5.117.156.944,47

Kab. Tapanuli Utara, 18-04-2024
Kepala SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


RUDI SITORUS, S.SOS, M.Si
NIP.197204291992031003